

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMISKINAN DI WILAYAH TAPAL KUDA TAHUN 2012-2018

Annasrul Hidayatullah^{a*}, Zainal Arifin^a, Muhammad Sri Wahyudi Suliswanto^a

^aEkonomi Pembangunan, Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Malang, Jl. Raya Tlogomas No.246 Malang, Indonesia

*Coressponding author: annasrulhidayatullah7@gmail.com

Article Info

Article history:

Received 26 November 2020

Revised 20 January 2021

Accepted 15 March 2021

Available online 20 May 2021

Keywords: Poverty, GDP, HDI, Minimum Wages

JEL Classification:

Abstract

The purpose of this study was to analyze the effect of Gross Domestic Product (GDP), Human Development Index (HDI) and Minimum Wages on poverty in the Tapal Kuda area. The regression analysis used in this study is panel data with the model used is Fixed Effect. In this study using quantitative types and types of secondary data obtained from the publication of the Central Bureau of Statistics. The results showed that the variables of GDP and HDI had a negative and significant effect on poverty. While the minimum wage variable has a positive and significant effect on poverty in the Tapal Kuda area.

PENDAHULUAN

Kemiskinan dapat diartikan dimana seseorang tidak mampu dalam memenuhi tuntutan kehidupan sehari-hari khususnya dari aspek pendapatan dan konsumsi. Kemiskinan juga dapat disebabkan oleh rendahnya pertumbuhan ekonomi, rendahnya kualitas hidup manusia, serta upah pekerja yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Kondisi masyarakat yang dikategorikan dalam penduduk miskin dapat diketahui berdasarkan kemampuan pendapatan masyarakat dalam memenuhi standar hidup (Maulidah, 2013).

Salah satu indikator utama dalam melakukan pembangunan adalah penurunan pada jumlah penduduk miskin. Memilih strategi yang tepat dalam melakukan pembangunan akan memberikan hasil yang efektif pada penurunan jumlah penduduk miskin. Pemilihan sektor titik berat atau sektor andalan merupakan salah satu kriteria utama dalam melakukan pembangunan nasional secara efektif untuk menurunkan jumlah penduduk miskin (Sukmaraga, 2011).

Salah satu sasaran pemerintah dalam melakukan pembangunan nasional adalah menurunkan tingkat kemiskinan. Permasalahan kemiskinan menjadi sebuah permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional. Oleh karena itu, upaya dalam melakukan pengentasan kemiskinan harus dilaksanakan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat dan diselenggarakan secara terpadu (Amali, 2017).

Kemiskinan menjadi permasalahan serius yang dihadapi oleh wilayah Tapal Kuda yang belum dapat terselesaikannya masalah kemiskinan. Kemiskinan di wilayah Tapal Kuda jika dibandingkan dengan wilayah

lainnya merupakan kemiskinan tertinggi di Provinsi Jawa Timur, dengan rata-rata jumlah penduduk miskin sebesar 161.876 ribu jiwa (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2019).

Kemiskinan di wilayah Tapal Kuda setiap tahunnya mengalami penurunan, namun keberhasilan dalam menanggulangi kemiskinan masih belum signifikan, karena kemiskinan di wilayah Tapal Kuda masih tinggi dan rata-rata kemiskinan berada di atas rata-rata kemiskinan Provinsi Jawa Timur. Kemiskinan di wilayah Tapal Kuda dapat dilihat pada jumlah penduduk miskin.

Kemiskinan di wilayah Tapal Kuda setiap tahunnya mengalami penurunan, namun keberhasilan dalam menanggulangi kemiskinan masih belum signifikan, karena kemiskinan di wilayah Tapal Kuda masih tinggi. Kemiskinan di wilayah Tapal Kuda dapat dilihat pada jumlah penduduk miskin. Kemiskinan tertinggi di wilayah Tapal Kuda pada tahun 2014 sampai 2018 berada di Kabupaten Probolinggo dengan nilai rata-rata sebesar 232.620 ribu jiwa, sedangkan kemiskinan terendah berada di Kabupaten Situbondo dengan nilai rata-rata sebesar 87.410 ribu jiwa (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2019).

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu kunci untuk menurunkan kemiskinan yang ada pada suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan berdampak pada pengurangan kemiskinan yang terjadi, hal tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Salah satu indikator pertumbuhan ekonomi adalah PDRB. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah suatu nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi yang dilakukan di suatu daerah dalam periode tertentu (Indradewa, 2015).

Menurut Sadono Sukirno dalam (Noegroho & Soelistianingsih, 2007) mengemukakan bahwa laju pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan pada PDRB tanpa memilikat apakah kenaikan yang terjadi lebih besar atau lebih kecil. Pembangunan ekonomi bukan hanya diukur berdasarkan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara menyeluruh, tetapi juga harus memperhatikan sejauh mana distribusi pendapatan yang telah disebar ke seluruh lapisan masyarakat serta masyarakat menikmati hasil-hasilnya. Sehingga menurunnya PDRB pada suatu daerah akan mengakibatkan dampak buruk bagi kualitas konsumsi masyarakat. Apabila pendapatan masyarakat sangat terbatas dan banyak penduduk miskin, maka terpaksa untuk merubah pola makanan pokoknya ke barang yang lebih murah. Nilai rata-rata PDRB wilayah Tapal Kuda pada tahun 2018 sebesar 80.173,45 miliar (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2019).

Kemiskinan juga dapat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, kualitas sumber daya manusia dapat dilihat melalui indeks pembangunan manusia. Rendahnya indeks pembangunan manusia dapat mengakibatkan

menurunnya produktivitas kerja dari penduduk, produktivitas yang rendah berakibat pada rendahnya pendapatan yang diperoleh penduduk dari bekerja. Sehingga apabila penduduk memperoleh pendapatan yang rendah akan menyebabkan tingginya jumlah penduduk miskin. Pembangunan manusia di Indonesia adalah identik dengan pengurangan jumlah kemiskinan. Adanya fasilitas pendidikan dan kesehatan akan sangat berguna bagi masyarakat untuk meningkatkan produktifitas, sehingga kualitas sumber daya manusia sangatlah penting untuk mengurangi jumlah kemiskinan (Aprianto, 2019).

Menurut mulyaningsih dalam (Sayifullah & Gandasari, 2016), menjelaskan bahwa didalam indeks pembangunan manusia terdapat indikator-indikator penting dalam pembangunan yaitu untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehat dan panjang umur, untuk mendapatkan pengetahuan dan memiliki akses terhadap sumberdaya yang dapat memenuhi standar hidup. Nilai IPM di wilayah Tapal Kuda pada tahun 2018 sebesar 68,38. Hal tersebut menjelaskan bahwa nilai IPM di wilayah Tapal Kuda berada dibawah nilai IPM Provinsi Jawa Timur (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2019).

Faktor lain yang mempengaruhi kemiskinan adalah upah minimum, Penetapan tingkat upah yang dilakukan pemerintah pada suatu daerah akan memberikan pengaruh terhadap kemiskinan. Upah yang ditetapkan oleh pemerintah akan berdampak pada jumlah pengangguran, hal tersebut terjadi karena semakin kecil upah yang diterima oleh tenaga kerja akan mengakibatkan penurunan jumlah tenaga kerja yang bekerja pada suatu daerah tersebut sehingga kemiskinan juga akan meningkat (Yudha, 2013).

Menurut Kaufman dalam (Kristanto, 2014), berpendapat bahwa tujuan utama dari ditetapkannya upah minimum yaitu untuk memenuhi kebutuhan standar hidup seperti kesehatan, efisiensi serta kesejahteraan tenaga kerja. Upah minimum juga sebagai usaha untuk meningkatkan derajat penduduk yang memiliki pendapatan yang rendah terutama penduduk yang miskin. Upah minimum wilayah Tapal Kuda pada tahun 2018 sebesar Rp 2.325.001. Hal tersebut menjelaskan bahwa upah minimum di wilayah Tapal Kuda termasuk salah satu upah minimum tertinggi jika dibandingkan dengan wilayah lainnya di Provinsi Jawa Timur (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, 2017).

Menurut (Putra, 2011) dengan judul “Pengaruh PDRB, Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001-2010”. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh PDRB, pendidikan dan pengangguran terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2001-2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel PDRB memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan variabel pendidikan dan

pengangguran memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001-2010.

Penelitian yang dilakukan oleh (Zaman, 2011) dengan judul “Analisis Data Panel Pertumbuhan, Ketimpangan dan Kemiskinan: Bukti dari Negara-negara SAARC”. Tujuan penelitian ini mengkaji tentang dampak pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan terhadap kemiskinan untuk panel dari lima negara SAARC terpilih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif yang signifikan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan terhadap kemiskinan pada panel lima negara SAARC terpilih.

Menurut (Yudha, 2013) dengan judul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Inflasi Terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 2009-2011”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum, tingkat pengangguran terbuka dan inflasi terhadap kemiskinan di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan variabel upah minimum dan inflasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Menurut (Zudiyaty, 2018) dengan judul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia Selama Lima tahun Terakhir”. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Indonesia selama kurun waktu lima tahun 2011-2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel pertumbuhan ekonomi, TPT, dan IPM memiliki hubungan yang negatif terhadap kemiskinan, dan secara parsial pada variabel pertumbuhan ekonomi dan TPT memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan, , sedangkan variabel IPM memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Menurut (Ayu, 2018) dengan judul “Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Tingkat Pengangguran Terbuka, IPM, Jumlah Penduduk dan Upah Minimum Terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2015”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel independen Produk Domestik Regional Bruto, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, Jumlah Penduduk, dan Upah Minimum Kabupaten/Kota terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Timur. Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel Produk Domestik Regional Bruto, tingkat pengangguran terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur, sementara variabel Upah Minimum Kabupaten/Kota berpengaruh positif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur.

Terdapat adanya perbedaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu, yaitu penelitian ini menggunakan data selama 7 tahun yaitu dari dalam kurun waktu tahun 2012 sampai 2019, pada penelitian ini menggunakan 3 variabel bebas yaitu Produk Domestik Regional bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan upah minimum. Pada penelitian ini lokasi yang digunakan adalah wilayah Tapal Kuda Provinsi Jawa Timur. Terdapat masalah pada penelitian yaitu wilayah Tapal Kuda merupakan wilayah dengan jumlah penduduk miskin tertinggi di Provinsi Jawa Timur. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh variabel PDRB, IPM dan upah minimum terhadap kemiskinan di wilayah Tapal Kuda tahun 2012 sampai 2018.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah Tapal Kuda Provinsi Jawa Timur, lokasi tersebut terdiri dari 9 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Situbondo merupakan wilayah dengan jumlah penduduk miskin tertinggi di Provinsi Jawa Timur.

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu jenis penelitian kuantitatif, hal tersebut dapat dilihat dari data dan cara memperoleh data. Data yang diperoleh bersifat numerik. Populasi pada penelitian ini yaitu berjumlah 9 Kabupaten/Kota yang termasuk dalam wilayah Tapal Kuda untuk dijadikan sebagai sampel pada penelitian. Pada penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang didapat sudah diolah dan hasil publikasi dari badan yang terkait. Data yang digunakan penelitian ini berupa jumlah penduduk miskin, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan upah minimum yang diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah melalui dokumentasi dengan cara mengumpulkan data yang telah dipublikasi oleh sumber-sumber tertentu. Data penelitian ini menggunakan data yang terdapat pada publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan pada penelitian adalah analisis regresi data panel, regresi data panel merupakan teknik analisis data yang menggabungkan antara data *time series* dan *cross section*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wilayah Tapal Kuda merupakan nama sebuah daerah atau kawasan di Provinsi Jawa Timur, lebih tepatnya letak kawasan Tapal Kuda berada dibagian timur Provinsi Jawa Timur. Kawasan tersebut dinamakan *Tapal Kuda* karena jika dilihat pada peta akan tampak mirip seperti bentuk tapal kuda. Kawasan Tapal Kuda berdasarkan konteks letak geografis dapat dibagi menjadi 3 sub-wilayah yaitu :

1. Sub-wilayah Pulau Madura, meliputi Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten pamekasan dan Kabupaten Sumenep.
2. Sub-wilayah Teluk Madura, meliputi Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo.
3. Sub-wilayah Selata Madura, meliputi Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Situbondo.

Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Tapal Kuda memiliki kesamaan pada karakteristik wilayah, iklim serta geografisnya. Penduduk di wilayah Tapal Kuda dihuni oleh suku Madura dan suku Jawa, di sub-wilayah pulau Madura semua penduduknya merupakan suku Madura, sedangkan penduduk di sub-wilayah teluk dan selat Madura merupakan suku Madura dan suku Jawa, namun sebagian besar mayoritasnya dihuni oleh suku Madura. Hal tersebut dikarenakan Penduduk di pulau Madura banyak yang merantau ke bagian timur Provinsi Jawa Timur.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Kota di Wilayah Tapal Kuda Tahun 2012-2018 (dalam ribuan)

Kab/Kota	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-rata
Bangkalan	22.980	21.830	21.220	21.623	20.571	20.653	19.133	21.144
Sampang	25.340	24.820	23.960	24.035	22.780	22.513	20.482	23.419
Pamekasan	16.080	15.370	14.880	14.692	14.232	13.777	12.576	14.515
Sumenep	23.220	22.550	21.890	21.684	21.614	21.192	21.860	22.001
Surabaya	17.570	16.940	16.440	16.572	16.101	15.471	14.081	16.168
Sidoarjo	13.050	13.820	13.380	13.613	13.679	13.542	12.575	13.380
Pasuruan	17.910	17.570	17.070	16.919	16.806	16.564	15.248	16.870
Probolinggo	24.850	23.870	23.190	23.696	24.047	23.672	21.706	23.576
Situbondo	9.450	9.030	8.770	9.117	8.968	8.823	8.027	8.884
Rata-rata	18.939	18.422	17.867	17.995	17.644	17.356	16.188	17.773
Jawa Timur	499.270	489.300	474.840	478.912	470.330	261.701	433.259	472.516

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur 2019

Pada Tabel 1 menunjukkan bahwa rata-rata jumlah penduduk miskin di wilayah Tapal Kuda Provinsi Jawa Timur pada tahun 2012-2018 mengalami

penurunan meskipun tidak signifikan. Nilai rata-rata jumlah penduduk miskin tertinggi di wilayah Tapal Kuda berada di Kabupaten Probolinggo dengan nilai rata-rata sebesar 23.576 ribu jiwa. Kondisi tersebut disebabkan karena rendahnya pendapatan per kapita, rendahnya kualitas sumber daya manusia. Sedangkan nilai rata-rata jumlah penduduk miskin terendah berada di Kabupaten Situbondo dengan nilai rata-rata sebesar 8.884 ribu jiwa. Hal tersebut disebabkan karena pendapatan per kapita Kabupaten Situbondo setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan serta memiliki jumlah penduduk yang paling rendah di wilayah Tapal Kuda.

Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten/Kota di Wilayah Tapal Kuda Tahun 2012-2018 (dalam ribuan)

Kab/Kota	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	rata-rata
Bangkalan	16.173	16.204	17.369	16.906	17.018	17.618	18.368	17.094
Sampang	10.910	11.623	11.632	11.874	12.606	13.197	13.793	12.234
Pamekasan	7.894	83.75	8.846	93.16	9.815	10.310	10.873	9.093
Sumenep	17.665	20.218	21.476	21.750	22.311	22.949	23.770	21.448
Surabaya	265.892	286.050	305.947	324.215	343.652	364.714	387.333	325.400
Sidoarjo	93.543	99.992	106.434	112.012	118.179	125.039	132.598	112.542
Pasuruan	70.167	75.043	80.105	84.415	89.011	94.101	99.553	84.628
Probolinggo	16.936	17.808	18.682	19.570	20.504	21.418	22.375	19.613
Situbondo	9.411	9.993	10.572	11.086	11.640	12.230	12.894	11.118
Rata-rata	56.510	60.590	64.563	67.905	71.637	75.731	88.835	69.396
Jawa Timur	1.124.464	1.192.789	1.262.697	1.331.418	1.421.042	1.502.443	1.585.911	1.345.823

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur 2019

Pada tabel diatas menjelaskan bahwa kondisi rata-rata Produk Domestik Regional Bruto di wilayah Tapal Kuda Provinsi Jawa Timur pada rentan tahun 2012-2018 setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan yang signifikan. Rata-rata nilai PDRB tertinggi berada di Kota Surabaya dengan nilai sebesar 325.400 ribu. Kondisi tersebut terjadi karena banyaknya industri-industri besar dan tingginya produktivitas tenaga kerja di Kota Surabaya. Sedangkan rata-rata nilai PDRB terendah terdapat di Kabupaten Pamekasan dengan nilai sebesar 9.093 ribu. Hal tersebut disebabkan karena keterbatasannya sumberdaya alam dan rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja di Kabupaten Pamekasan.

Tabel 3. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Wilayah Tapal Kuda Tahun 2012-2018

Kab/Kota	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-rata
Bangkalan	59,65	60,19	60,71	61,49	62,06	62,30	62,87	61,32
Sampang	55,78	56,45	56,98	58,18	59,09	59,90	61,00	58,20
Pamekasan	61,21	62,27	62,66	63,10	63,98	64,93	65,41	63,37
Sumenep	60,08	60,84	61,43	62,38	63,42	64,28	66,25	62,67
Surabaya	78,05	78,51	78,87	79,47	80,38	81,07	81,74	79,73
Sidoarjo	75,14	76,39	76,78	77,43	78,17	78,70	79,50	77,44
Pasuruan	62,31	63,74	64,35	65,04	65,71	66,69	67,41	65,04
Probolinggo	61,33	62,61	63,04	63,83	64,12	64,28	64,85	63,44
Situbondo	62,23	63,43	63,91	64,53	65,08	65,68	66,42	64,47
Rata-rata	63,98	64,94	65,41	66,16	66,89	67,54	68,38	66,19
Jawa Timur	66,74	67,55	68,14	68,95	69,74	70,27	70,77	68,88

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur 2019

Berdasarkan data pada tabel diatas menjelaskan bahwa perkembangan indeks pembangunan manusia di wilayah Tapal Kuda pada tahun 2012 hingga 2018 setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan yang signifikan. Indeks pembangunan manusia tertinggi di wilayah Tapal Kuda terdapat pada Kota Surabaya dengan nilai rata-rata sebesar 79,73. Tingginya angka indeks pembangunan manusia di Kota Surabaya dikarenakan Kota Surabaya merupakan salah satu pusat pendidikan terbesar di Provinsi Jawa Timur serta sarana pra sarana di Kota Surabaya sudah lengkap. Sedangkan indeks pembangunan manusia terendah di wilayah Tapal Kuda terdapat pada Kabupaten Sampang. Hal tersebut disebabkan karena tingkat pendidikan di Kabupaten Sampang merupakan yang paling tertinggal dari Kabupaten/Kota lain di wilayah Tapal Kuda.

Tabel 4. Upah Minimum Kabupaten/Kota di Wilayah Tapal Kuda Tahun 2012-2018

Kab/Kota	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-rata
Bangkalan	885.000	983800	1.102.00	1.267.30	1.414.00	1.530.65	1.663.97	1.263.81
Sampang	800.000	1.104.60	1.120.00	1.243.20	1.387.00	1.501.42	1.632.20	1.255.49
Pamekasan	975.000	1.059.60	1.090.00	1.209.90	1.350.00	1.461.35	1.588.66	1.247.78
Sumenep	825.000	965.000	1.090.00	1.253.50	1.398.00	1.513.33	1.645.14	1.241.42
Surabaya	1.257.00	1.740.00	2.200.00	2.710.00	3.045.00	3.296.21	3.583.31	2.547.36
Sidoarjo	1.252.00	1.720.00	2.190.00	2.705.00	3.040.00	3.290.80	3.577.42	2.539.31
Pasuruan	0	0	0	0	0	3	6	0
Probolinggo	888.500	1.198.00	1.353.75	1.556.80	1.736.00	1.879.22	2.042.90	1.522.16
Situbondo	802.500	1.048.00	1.071.00	1.231.65	1.374.00	1.487.35	1.616.90	1.233.05
Rata-rata	993.000	1.282.11	1.489.63	1.764.15	1.975.72	2.138.71	2.325.00	1.709.76
Jawa Timur	745.000	866.250	1.000.00	1.000.00	1.273.70	1.388.00	1.508.89	1.111.69

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur 2017

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa besaran Upah Minimum di Kabupaten/Kota wilayah Tapal kuda pada tahun 2012-2018 setiap tahun mengalami peningkatan. Upah minimum tertinggi terdapat di Kota Surabaya dengan nilai rata-rata sebesar Rp 2.547.361. Hal tersebut terjadi karena pertumbuhan ekonomi dan produktivitas tenaga kerja di Kota Surabaya sangat tinggi sehingga pemerintah Kota Surabaya menetapkan upah yang tinggi. Sedangkan upah minimum yang terendah terdapat di Kabupaten Situbondo dengan nilai rata-rata sebesar Rp 1.233.058. Hal tersebut terjadi karena pembangunan ekonomi di Kabupaten Situbondo masih belum maksimal.

Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Data Panel

Variabel	Coeff	Fixed Effect t-Stat	Prob.
Dependent Variable : Kemiskinan			
C	5.833.736	1.013.673	0.0000
PDRB	-0.448998	-3.213.097	0.0023
IPM	-1.249.433	-2.790.483	0.0074
UPAH MINIMUM	0.110794	2.266.063	0.0277
Effect Specification			
R-Squared	0.990812	F-statistic	4.999.539
Adjusted R-squared	0.9888830	Prob (F-statistic)	0.000000

Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa, dari hasil melakukan pengujian Uji *Chow*, Uji *Hausman* dan Uji LM didapatkan hasil estimasi dari penggunaan model *Fixed Effect* (FE) yang hasilnya sesuai dengan syarat data panel, dimana jumlah dari cross section lebih banyak daripada jumlah time series. Nilai Probabilitas masing-masing variabel PDRB, IPM dan Upah Minimum pada penelitian ini kurang dari 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa masing masing variabel yaitu PDRB, IPM, dan upah minimu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan di wilayah Tapal Kuda. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, maka didapatkan hasil estimasi dari penggunaan model *Fixed Effect* (FE) memperoleh hasil persamaan regresi panel sebagai berikut :

$$Y_i = \beta_0 - \beta_1 X_{1i} - \beta_2 X_{2i} + \beta_3 X_{3i} + e_i$$

$$Y_i = 5.833736 - 0.448998 X_{1i} - 1.249433 X_{2i} + 0.110794 X_{3i} + e_i$$

Keterangan :

- Y_i : Kemiskinan (dalam ribu)
- β_0 : Intersep
- X_{1i} : Produk Domestik Regional Bruto (dalam miliar)
- X_{2i} : Indeks Pembangunan Manusia (dalam tahun)
- X_{3i} : Upah Minimum (dalam rupiah)
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien Regresi
- e_i : Komponen error di waktu t untuk unit *cross section* i

Berdasarkan dari hasil diatas dapat diketahui bahwa pada variabel Produk Domestik Regional Bruto dan indeks pembangunan manusia memiliki nilai koefisien yang negatif, sedangkan variabel upah minimum memiliki nilai koefisien yang positif. Berdasarkan hal tersebut dapat dijelaskan dengan analisis sebagai berikut :

$\beta_0 = 5.833763$ yang artinya bahwa pada variabel kemiskinan sebesar 5.833763, dengan asumsi bahwa variabel yang lain tidak ada perubahan.

$\beta_1 = -0.448998$ yang artinya jika variabel tingkat pengangguran terbuka mengalami kenaikan 1 persen, maka kemiskinan akan mengalami penurunan sebesar 0.448998 persen, dengan mengasumsikan bahwa variabel lainnya konstan atau tetap.

$\beta_2 = -1.249433$ yang artinya jika pada variabel indeks pembangunan manusia mengalami kenaikan 1 persen, maka tingkat kemiskinan akan mengalami penurunan sebesar 1.249433 persen, dengan mengasumsikan bahwa variabel lainnya konstan atau tetap.

$\beta_3 = 0.110794$ yang artinya jika variabel jumlah penduduk naik 1 persen, maka tingkat kemiskinan akan mengalami kenaikan sebesar 0.110794 persen, dengan mengasumsikan bahwa variabel lainnya konstan atau tetap.

Uji F (Simultan)

Uji Simultan atau disebut juga Uji F dapat dilihat juga pada tabel 5 yang mana digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang digunakan dalam penelitian berpengaruh secara bersamaan terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil nilai probabilitas F-satistik sebesar 0.000000, artinya nilai tersebut lebih kecil dari 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh antara variabel independen yaitu Produk Domestik Regional Bruto, indeks pembangunan manusia, dan upah minimum terhadap variabel dependen yaitu kemiskinan.

Uji t (Parsial)

Uji parsial atau disebut juga uji t digunakan untuk mengetahui apakah setiap masing-masing variabel independen memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Dapat dilihat pada tabel 5 menunjukkan hasil dari Uji t masing-masing variabel independen dapat diketahui sebagai berikut :

Pengaruh Produk Domestik regional Bruto terhadap kemiskinan.

Dapat dilihat pada tabel 5 menunjukkan bahwa variabel Produk Domestik regional Bruto memiliki nilai t statistik sebesar -3.213097, artinya variabel Produk Domestik regional Bruto memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan. Pada nilai probabilitas memiliki nilai sebesar 0.0023 yang mana nilai tersebut lebih kecil dari 0.05, sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel Produk Domestik Regional Bruto memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan

Dapat dilihat pada tabel 5 menunjukkan bahwa variabel indeks pembangunan manusia memiliki nilai t statistik sebesar -2.790483, nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan. Pada nilai probabilitas memiliki nilai sebesar 0.0074 yang mana nilai tersebut lebih kecil dari 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Pengaruh upah minimum terhadap kemiskinan

Dapat dilihat pada tabel 5 menunjukkan bahwa variabel upah minimum memiliki nilai t statistik sebesar 2.266063, maka dapat dikatakan variabel upah minimum memiliki pengaruh positif terhadap kemiskinan. Nilai probabilitas memiliki nilai sebesar 0.0277 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0.05, maka dapat dinyatakan bahwa variabel upah minimum memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Koefisien Determinasi (R^2)

Dapat dilihat pada tabel 5 menunjukkan koefisien determinasi dapat digunakan untuk menggambarkan apakah model yang digunakan pada penelitian menunjukkan adanya BLUE (*Best Linier Unbiased Estimator*) yang terdapat pada nilai R^2 , jika nilai R^2 semakin mendekati angka 1 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang kuat. Berdasarkan hasil koefisien determinasi pada model *Fixed Effect* diperoleh nilai Adjusted R-squared sebesar 0.988830 atau 98,89 persen. Artinya nilai tersebut menunjukkan terdapat adanya pengaruh antara variabel dependen (kemiskinan) yang dapat dijelaskan oleh variabel independen (Produk Domestik Regional Bruto, indeks pembangunan manusia, dan upah minimum) serta sisanya sebesar 1,11 persen dapat dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dikaji dalam penelitian maka didapati bahwa variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap variabel Kemiskinan. Hal tersebut dapat diartikan bahwa ketika PDRB semakin mengalami kenaikan maka dapat menurunkan kemiskinan di wilayah Tapal Kuda. Untuk itu pemerintah hendaknya dapat meningkatkan pengelolaan potensi-potensi ekonomi yang dimiliki setiap Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Tapal Kuda, agar potensi yang dimiliki dapat dimaksimalkan secara efektif sehingga dapat meningkatkan lagi nilai PDRB yang nantinya dapat menurunkan kemiskinan di wilayah Tapal Kuda. Variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap variabel kemiskinan. Hal tersebut dapat diartikan bahwa apabila IPM mengalami peningkatan maka dapat mengurangi kemiskinan di wilayah Tapal Kuda. Maka pemerintah diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan menambah pengadaan pelatihan keterampilan dan teknologi agar dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat sehingga nantinya dapat menurunkan kemiskinan di wilayah Tapal Kuda. Variabel upah minimum memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kemiskinan. Hal tersebut dapat diartikan bahwa apabila upah minimum mengalami peningkatan maka akan menyebabkan peningkatan kemiskinan di wilayah Tapal Kuda. Kondisi tersebut membuat pemerintah harus lebih serius dalam

menyikapi terkait masalah upah yang diterima oleh tenaga kerja. Pemerintah diharapkan harus tetap meningkatkan upah minimum sesuai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) agar dapat melindungi tenaga kerja dari kemiskinan, karena kebutuhan hidup semakin lama akan semakin meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amali. (2017). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia Dan Belanja Langsung Terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 17(2), 85–102.
- Aprianto, R. (2019). Analisis Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Menekan Angka Kemiskinan. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 2(2), 363–377. <https://doi.org/10.36778/jesya.v2i2.111>
- Ayu, D. S. (2018). Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Tingkat Pengangguran Terbuka, Jumlah Penduduk dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2015. In *Universitas Islam Indonesia*.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. (2019). *Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2019*. <https://jatim.bps.go.id>
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. (2017). *Keputusan Gubernur Jawa Timur Tentang UMK 2018*. <https://disnakertrans.jatimprov.go.id/>
- Indradewa. (2015). Pengaruh Inflasi, Pdrb Dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 4(8), 923–950.
- Kristanto, P. D. (2014). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Kabupaten Brebes Tahun 1997-2012. In *Universitas Diponegoro*.
- Maulidah. (2013). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pendapatan Dan Konsumsi Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Jawa Timur. *Pendidikan Dan Kewirausahaan*, 3(1), 227–240.
- Noegroho, Y. S., & Soelistianingsih, L. (2007). *Analisis Disparitas Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Regional*. 2, 1–30.
- Putra, S. T. (2011). Pengaruh PDRB, Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001-2010. In *UPT Perpustakaan Universitas Sebelas Maret*.
- Sayifullah, S., & Gandasari, T. R. (2016). Pengaruh Indeks Pembangunan

Manusia Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Banten.
Jurnal Ekonomi-Qu, 6(2), 236–255.
<https://doi.org/10.35448/jequ.v6i2.4345>

Sukmaraga, P. (2011). *ANALISIS PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, PDRB PER KAPITA, DAN JUMLAH PENGANGGURAN TERHADAP JUMLAH PENDUDUK MISKIN DI PROVINSI JAWA TENGAH.*

Yudha, O. R. P. (2013). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum, tingkat pengangguran terbuka, dan inflasi terhadap kemiskinan di indonesia tahun 2009-2011. In *UNNES Repository*.

Zaman, K. (2011). Panel Data Analysis of Growth, Inequality and Poverty: Evidence From Saarc Countries. *Journal of Yaşar University*, 6(21), 3523–3537. <https://doi.org/10.19168/jyu.59660>

Zudiyaty, N. (2018). Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Indonesia Selama Lima Tahun Terakhir. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia*, 11(2), 27–31.
<https://doi.org/10.32812/jibeka.v11i2.42>